



Kemendikdasmen

**Laporan Kinerja Triwulan I
BPMP Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2026**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi Kalimantan Selatan selama Triwulan I tahun 2026.

A. Progress Capaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/Indikator/RO	Satuan	Target Tahunan	Triwulan I		Anggaran	
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi
[SK 1] Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen						
[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Persen	81.78	0	0		
DI.7605.QDB.750 Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	7960	900	1510	Rp5.085.393.000	Rp3.237.246.932
[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	Persen	100	0	0		
DI.7605.QDB.751 Pemda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan	Lembaga	14	0	0	Rp461.857.000	Rp206.971.939
[SK 2] Meningkatkan tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Selatan						

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Sasaran/Indikator/RO	Satuan	Target Tahunan	Triwulan I		Anggaran	
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik	-	-		
WA.7606.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	0	Rp13.416.329.000	Rp8.388.757.505
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kalimantan Selatan minimal A	Predikat	AA	-	-		
WA.7606.EBA.956 Layanan BMN	Dokumen	1	0	0	Rp7.500.000	Rp0
WA.7606.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	0	0	Rp166.834.000	Rp69.978.880

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Penyusunan Bahan Advokasi/Penguatan Dinas Pendidikan Kab/Kota dalam Pembelajaran Mendalam (PM) dan Koding Kecerdasan Artifisial (KKA);
2. Penguatan Tim PemanTIK Daerah untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan dalam penerimaan dan pemanfaatan bantuan Digitalisasi Pembelajaran (PID) 2026/ Pemanfaatan Rumah Pendidikan dan pengembangan Konten Pembelajaran;
3. Pelaksanaan pendampingan secara rutin melalui kanal komunitas pengelola Dana BOSP Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
4. Pembuatan dashboard pemantauan Dana BOSP pada satuan pendidikan;
5. Pendampingan penyaluran dana BOSP Tahap 1 Tahun 2026 melaui dashboard pemantauan Dana BOSP pada satuan pendidikan;
6. Pelaksanaan pendampingan secara rutin melalui kanal komunitas pengelola Dapodik Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Monev pelaksanaan upacara bendera sesuai SE nomor 4 tahun 2026 di 13 Kabupaten/Kota;
8. Penguatan pelaksanaan G7KAIH di Kepanduan, Kokurikuler, dan Esktrakurikuler angkatan I.

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Progress/Kegiatan

1. Selama Triwulan I telah dilaksanakan pendampingan terkait penyaluran dana BOSP dengan progress Sebanyak 7.798 (99,67%) satuan pendidikan semua jenjang telah salur Dana BOSP Tahap 1 Tahun 2026 dari total 7.824 satuan Pendidikan. Sebanyak 7.052 (87,69%) satuan pendidikan semua jenjang telah disahkan RKAS Dana BOSP Tahun Anggaran 2026;
2. Sampai dengan bulan Maret 2026, BPMP Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) dengan capaian sebanyak 709 satuan pendidikan yang terfasilitasi (akumulasi: 1.009 satuan pendidikan), terdiri dari: 186 PAUD; 388 SD; 71 SMP; 35 SMA; 20 SMK; 2 SLB; 5 PKBM dan 2 SKB. Terdapat beberapa Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:
 - Pendampingan lanjutan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di satuan pendidikan jenjang SMA/SMK di 13 Kab/Kota.
 - Fasilitasi Konsolidasi Daerah (Konsolda) Tahap II bersama Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk evaluasi dan penguatan program PMP semester pertama.
 - Pendampingan satuan pendidikan dalam pemutakhiran data Rapor Pendidikan dan pemanfaatannya untuk perbaikan mutu pembelajaran.
 - Koordinasi lintas program dalam rangka sinkronisasi data PMP dengan program BOSP, Dapodik, dan program prioritas lainnya;
3. Sampai dengan akhir Triwulan I BPMP Kalsel telah melaksanakan pendampingan pemanfaatan PID dalam pelaksanaan digitalisasi pembelajaran diantaranya melalui penyiapan fasilitator dari 13 Kab/Kota serta pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan PID dengan sasaran 1.300 satuan Pendidikan dengan rincian jenjang Paud sebanyak 390 satuan; jenjang SD sebanyak 390 satuan; jenjang SMP sebanyak 390 satuan; jenjang SMA/SMK sebanyak 65 satuan serta Lembaga Non Formal sebanyak 65 lembaga. Kegiatan Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman satuan pendidikan tentang penerapan teknologi dalam pembelajaran, berbasis digital yang lebih efektif. Menyosialisasikan strategi digitalisasi pembelajaran yang dapat diterapkan di satuan pendidikan serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integrasi teknologi dalam pendidik;
4. Terkait pendampingan Pendidikan Karakter, sampai dengan akhir Triwulan I BPMP Kalsel telah menyelesaikan kegiatan Penguatan Pelaksanaan G7KAIH di Kepanduan, Kokurikuler, Ekstrakurikuler dengan sasaran 140 satuan Pendidikan. Kegiatan ini berisi tentang Penguatan pemahaman mengenai kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH), serta keterkaitannya dengan program yang dimiliki satuan pendidikan, serta penyampaian materi pendukung lainnya yang terkait dengan G7KAIH. Selanjutnya terkait Penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kepanduan, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berbasis karakter dan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) oleh masing-masing satuan pendidikan peserta advokasi sebagai bentuk komitmen konkret untuk mengintegrasikan G7KAIH ke dalam budaya dan kegiatan sekolah.

Kendala/Permasalahan

1. Sebagian satuan pendidikan SMA/SMK mengalami kesulitan dalam menyelaraskan implementasi SPMI dengan kurikulum Merdeka yang masih dalam proses adaptasi;
2. Belum semua satuan pendidikan memperbarui data pada platform Rapor Pendidikan secara berkala sehingga data yang tersedia kurang mutakhir;
3. Keterbatasan anggaran operasional di beberapa Kab/Kota menghambat pelaksanaan program pendampingan PMP secara menyeluruh.

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menyediakan modul pendampingan SPMI yang disesuaikan dengan konteks implementasi Kurikulum Merdeka agar lebih relevan dan mudah diterapkan;
2. Mengirimkan surat edaran kepada Disdik Kab/Kota untuk mendorong satuan pendidikan melakukan pembaruan data Rapor Pendidikan secara rutin setiap bulan;
3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi (webinar, aplikasi, media sosial) sebagai media pendampingan alternatif yang lebih efisien dan terjangkau.

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Evaluasi Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025;
2. pelaksanaan Sosialisasi SPMB bagi Disdik dan Pemangku Kepentingan yang dilaksanakan secara daring;
3. Pelaksanaan Bimtek SPMB bagi Disdik dan Pemangku Kepentingan;
4. Melaksanakan Rakor Progres Perencanaan Dokumen SPMB ke-1 yang dilaksanakan dengan moda Daring;
6. Melakukan Pendampingan SPMB pada Kab/Kota;
7. Mengikuti Rapat Koordinasi Pendataan TKA Jenjang SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat Tahun 2026;
8. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan TKA Jenjang SD/MI/ Sederajat dan SMP/MTs./ Sederajat Tahun 2026;
9. Pemantauan Verifikasi dan Validasi Data yang dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi Kalimantan Selatan melalui Laman Dashboard;
10. Pemantauan Pelaksanaan Gladi Bersih TKA Jenjang SD/MI/ Sederajat dan SMP/MTs./ Sederajat;
11. Memantau perkembangan capaian DNS dan DNT di laman dashbor TKA;
12. Penguatan kelembagaan pendidikan non formal dalam meningkatkan mutu pendidikan;
13. Koordinasi dalam meningkatkan komitmen pendidikan non formal (SKB dan PKBM) dalam penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah;
14. Pendampingan lanjutan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di satuan pendidikan;
15. Fasilitasi Konsolidasi Daerah (Konsolda) bersama Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk evaluasi dan penguatan pelaksanaan program PMP semester pertama;
16. Pendampingan satuan pendidikan dalam pemutakhiran data Rapor Pendidikan dan pemanfaatannya untuk perbaikan mutu pembelajaran;
17. Koordinasi lintas program dalam rangka sinkronisasi data PMP dengan program BOSP, Dapodik, dan program prioritas lainnya.

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Progress/Kegiatan

1. Terkait pelaksanaan SPMB tahun anjaran 2026/2027 BPMP Kalsel telah melaksanakan rapat koordinasi serta bimbingan teknis terhadap Dinas Pendidikan di 13 Kab/Kota, dimana kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan penguatan terhadap berbagai kebijakan regulasi SPMB. Sampai dengan akhir Triwulan I untuk Juknis 12 Kab/Kota sudah menyelesaikan kecuali Kab. Tapin sedangkan untuk SK Daya tampung juga sisa Kab. Tapin yang masih belum menyelesaikan;
2. Terkait pendampingan penganggaran SPM Pendidikan tahun anggaran 2027, BPMP kalsel telah menyelesaikan beberapa tahapan kegiatan diantaranya : (a) Pelaksanaan Desk Urusan Pendidikan dan Desk Tematik ProSN pada Rakortek Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 (31 Maret 2026, daring, Jam 13.00–15.30 WITA). Peserta: Disdikbud, Bapperida, OPD terkait Provinsi, dan perwakilan 13 Kab/Kota. (b) Pembahasan permasalahan urusan pendidikan dan ProSN serta tindak lanjut pemenuhan SPM Pendidikan sebagai bahan masukan dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD/Renja PD) Tahun 2027. (c) Pendampingan penyiapan dokumen teknis SPM Pendidikan oleh Disdikbud Provinsi dan Kab/Kota sebagai bahan Rakortek, mencakup identifikasi gap pemenuhan SPM dan usulan kegiatan untuk Renja PD 2027. Serta (d) Koordinasi dengan Bapperida dan BPKAD Provinsi terkait penyelarasan program dan kegiatan SPM Pendidikan dalam kerangka perencanaan Tahun 2027;
3. Terkait pelaksanaan program Revitalisasi Satuan Pendidikan, BPMP Kalsel telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Revitalisasi tahun anggaran 2025. Pelaksanaan Revitalisasi tahun anggaran 2025 Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan program revitalisasi sebanyak 219 satuan pendidikan yaitu jenjang PAUD sebanyak 26 sekolah, jenjang SD sebanyak 86 sekolah, jenjang SMP sebanyak 78 sekolah dan jenjang SMA sebanyak 29 sekolah. Sasaran program revitalisasi satuan pendidikan tersebut tersebar di 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dengan sebaran sebagai berikut : Kabupaten Balangan sebanyak 6 sekolah, Kabupaten Banjar sebanyak 32 sekolah, kabupaten Barito Kuala sebanyak 16 sekolah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 13 sekolah, kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 29 sekolah, kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 6 sekolah, kabupaten Kotabaru sebanyak 25 sekolah, kabupaten Tabalong sebanyak 27 sekolah, kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 26 sekolah, kabupaten Tanah Laut sebanyak 18 sekolah, kabupaten Tapin sebanyak 7 sekolah, kota Banjarbaru sebanyak 3 sekolah dan kota Banjarmasin sebanyak 11 sekolah. Seluruh satuan Pendidikan penerima bantuan Revitalisasi tahun anggaran 2025 sudah menyelesaikan pelaporan Pembangunan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kemendikdasmen.

Kendala/Permasalahan

1. Di Kota Banjarmasin dan Kab Banjar ada beberapa sekolah yang berpotensi tidak bisa menerima calon murid baru karena ketiadaan sapras/kelas. Dibeberapa daerah juga dijumpai ada potensi terjadi pergeseran tren pertumbuhan penduduk sehingga perlu penyesuaian daya tampung.rombel dalam kondisi pengecualian;
2. Usulan kegiatan SPM Pendidikan dari Disdikbud belum seluruhnya selaras dengan nomenklatur program dalam SIPD, sehingga berpotensi tidak terakomodir dalam dokumen Renja PD Tahun 2027;
3. Beberapa Kab/Kota hadir dengan data capaian SPM yang belum diperbarui, sehingga hasil Desk Urusan belum dapat menggambarkan kondisi riil pemenuhan SPM Pendidikan;
4. Waktu pelaksanaan Desk Urusan yang terbatas (2,5 jam) tidak mencukupi untuk membahas permasalahan SPM secara mendalam bagi seluruh 13 Kab/Kota.

Strategi/Tindak Lanjut

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1. BPMP Kalsel telah melakukan verval terhadap usulan perubahan daya tampung/rombel dengan melakukan pendampingan langsung ke daerah, membuka ruang konsultasi dengan menerima kunjungan disdik Kota Banjarmasin untuk menganalisis dan melakukan validasi terhadap data yang diajukan dan kemudian melakukan persetujuan jika memenuhi syarat pengecualian dengan pertimbangan: (a) Ketersediaan PTK (b) Menurunkan angka ATS dan menaikkan APS (c) sapras (d) akses satdik di sekitar dan (e) pembiayaan;

2. Memberikan pendampingan teknis kepada operator SIPD Disdikbud agar usulan kegiatan SPM Pendidikan menggunakan nomenklatur yang sesuai dengan struktur SIPD Tahun 2027.

Hasil: 7 Disdikbud Kab/Kota telah memperbaiki nomenklatur usulan kegiatan SPM Pendidikan dalam SIPD pasca Rakortek;

3. Mengirimkan format standar data capaian SPM Pendidikan kepada seluruh Disdikbud Kab/Kota sebelum pelaksanaan kegiatan berikutnya, disertai batas waktu pengisian.

Hasil: Format standar data SPM tersampaikan dan diisi oleh 11 dari 13 Kab/Kota sebelum akhir Februari 2026;

4. Menyusun agenda Desk Urusan lanjutan secara daring per klaster wilayah (Banjarmasin-Banjarbaru, Banjar-Tanah Laut, dsb.) agar pembahasan lebih fokus dan mendalam.

Hasil: Jadwal Desk Urusan lanjutan per klaster telah disepakati untuk dilaksanakan pada Maret-April 2026.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Selatan

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dengan kategori sangat baik

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. pelaksanaan analisis program dan anggaran serta pelaksanaan Revisi anggaran;
2. penyusunan Rencana Penarikan Dana (Halaman III Dipa) untuk periode Triwulan I;
3. penginputan target kinerja capaian output tahun 2026 pada Aplikasi Sakti

Progress/Kegiatan

1. selama Triwulan I BPMP Kalsel telah melaksanakan revisi RKA-KL sebanyak 5 kali menyesuaikan kebijakan pelaksanaan program anggaran Ditjen PDM;
2. BPMP Kalsel telah melaksanakan penyusunan Rencana Penarikan Dana (Halaman III Dipa) untuk periode Triwulan I tahun anggaran 2026 pada bulan Februari;
3. BPMP kalsel telah menyelesaikan penginputan target kinerja capaian output tahun 2026 pada Aplikasi Sakti.

Kendala/Permasalahan

adanya kebijakan efisiensi anggaran terkait penajaman anggaran di beberapa akun belanja setelah pelaksanaan Revisi Halaman III Dipa Periode Triwulan I tahun anggaran 2026

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Strategi/Tindak Lanjut

Koordinasi dengan pihak Bagian anggaran Eselon I dan Kanwil DJPb Kemenkeu terkait penginputan penyesuaian Halaman III Dipa, dan bersamaan dengan terbitnya aturan relaksasi perhitungan IKPA untuk Triwulan I

[SK 2] Meningkatkan tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Selatan

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kalimantan Selatan minimal A

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025;
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
3. Penyusunan Reviu Renstra Periode 2025-2029 untuk tahun 2026;
4. Penyusunan Tindak Lanjut LHE implementasi SAKIP tahun 2025

Progress/Kegiatan

1. BPMP kalsel telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Lembaga tahun 2025 pada tanggal 31 Januari 2026;
2. BPMP Kalsel telah melaksanakan penyusunan Perjanjian kinerja kepala tahun 2026;
3. BPMP kalsel telah menyelesaikan Reviu Renstra periode 2025-2029 untuk tahun 2026 sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja tahun 2026;
4. BPMP kalsel telah menyelesaikan tindak lanjut LHE tahun 2025.

Kendala/Permasalahan

Adanya kendala aplikasi Spasikita dalam rangka penyusunan Pengukuran Kinerja Triwulan I tahun 2026

Strategi/Tindak Lanjut

Berdasarkan arahan dari Biro Perencanaan Kemendikdasmen penyusunan pengukuran kinerja Triwulan I tahun 2026 dilaksanakan secara manual dan diupload pada aplikasi Spasikita

C. Rekomendasi Pimpinan

1. Setiap Koordinator dan anggota tim kerja wajib memahami dan mempedomani perjanjian kinerja Lembaga serta tugas dan fungsi Lembaga sebagai dasar dalam penyusunan Program kerja sehingga dapat mempertanggungjawabkan kinerja dari program yang telah dilaksanakan selama Triwulan I;
2. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan program di Triwulan II yaitu penilaian IKPA, serapan anggaran, serta outcome dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat dirasakan dampaknya bukan hanya formalitas.

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Banjarbaru, 18 Juni 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BPMP Provinsi Kalimantan
Selatan

Santoso, S.Pd., M.Si

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR